

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR



RENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD. Yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja yang disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen Perencanaan atau Rencana yang memuat program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Dengan pengertian diatas, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 merupakan rencana pembangunan tahunan untuk mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2021 memuat arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan terkait Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sebagai satuan kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2021, Renja OPD merupakan dokumen rencana Pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2017 -2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut : “Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas Dalam Menanggulangi Bencana”

Tanggap adalah memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan bencana.

Tangguh adalah memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam menghadapi bencana serta memiliki kemampuan dan kepekaan didalam pengendalian bencana.

Terampil adalah memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang dimiliki dalam penanggulangan bencana.

Tuntas adalah melaksanakan upaya-upaya pemulihan dengan baik, terencana, terkoordinasi, menyeluruh terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana
2. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar tahun 2018 adalah :

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
27. Peraturan Daerah Bupati Kampar Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 08 November 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar
28. Peraturan Bupati Kampar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar pembangunan desa. Kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya alam dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021.
2. Mengembangkan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan regulasi yang lengkap dalam penanggulangan bencana.
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
5. Tercapainya penggunaan sumber daya alam secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

6. Membangun kemitraan dengan stakeholder dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana.

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d tahun berjalan.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang salah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

- 2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, berisikan uraian mengenai, sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD. Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penalahaan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran renja, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program kegiatan. Pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
OPD dan Prakiraan Maju.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja (Renja) OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kampar selama tahun 2021 dan Prakiraan target tahun 2021.

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dilaksanakan melalui

penjabaraan perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kampar.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar pada Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, sebagai berikut.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kampar adalah penjabaran penjelasan perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kampar tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja. Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kampar selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2021 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator

kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

- B. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya pengelolaan jasa surat menyurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan surat masuk berjumlah 1222 surat, surat keluar berjumlah 611 surat, SK Badan berjumlah 55 SK dan Nota Dinas 70 surat.

- b. Penyediaan Jasa kebersihan kantor

- Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor 12 bulan
- Meningkatnya suasana kerja yang nyaman untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

- c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Terlaksananya perawatan peralatan kantor dan perawatan Komputer sebanyak 8 unit (15 AC, 7 Komputer, 7 laptop).

- d. Penyediaan alat tulis kantor

- Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12 bulan 49 jenis.

- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Tersedianya barang cetakan, penggandaan selama 12 bulan, 11 jenis cetakan,

- d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Tersedianya AC 1 Buah, Personal Computer 2 Unit, Personal Computer Notebook 1 Unit, Printer 1 Unit.

- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Terlaksananya Pembayaran langganan surat kabar/majalah selama 12 bulan.

- f. Penyediaan makanan dan minuman Rapat

- Tersedianya makanan dan minuman rapat Badan selama 12 bulan sebanyak 19 kali dan untuk tamu sebanyak 24 kali
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Terlaksananya Perjalanan Dinas luar daerah sebanyak 35 orang
- h. Penyediaan jasa tenaga harian lepas.
 - Terlaksananya pembayaran honor tenaga harian lepas, 4 orang tenaga harian lepas, 5 orang penjaga malam, 4 orang supir, 8 orang tenaga kebersihan.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 94 kali.

4.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perbaikan dan pengecatan ruang bangunan kantor dan toilet.
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional roda 4 sebanyak 4 kendaraan, mobil dapur lapangan 1 unit, dan roda 2 sebanyak 4 unit.

4.2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implemantasi peraturan perundang-undangan.

- a. Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan SKP sebanyak 40 orang
- b. Terlaksananya Kenaikan pangkat pegawai BPBD Kabupaten Kampar sebanyak 3 orang.
- c. Terlaksananya pelatihan pegawai BPBD tentang penerima/penyimpan barang sebanyak 2 orang.

1.2.5 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- a. Terlaksananya Penyusunan LKJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah data tahun 2020, Laporan Tahunan data 2020, Berita acara serah terima kegiatan tahun 2018 dan target kinerja 2020.
- b. Terlaksananya penyusunan laporan fisik dan keuangan sebanyak 12 bulan
- Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
 - a. Terlaksananya penyusunan perencanaan kerja Badan; Renja SKPD, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan
 - b. Terwujudnya dokumen rencana kerja SKPD 2020
 - c. Terwujudnya dokumen Review Renstra 2012-2018

4.2.7. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

- a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan berbagai kegiatan antara lain yaitu :
 - Penyusunan monev bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan
 - Memonitoring Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (dana bantuan hibah APBN) di Kabupaten Kampar tahun 2018, diantaranya yaitu :
 - 1. Pembangunan Jembatan besi Desa Kualu Nenas
 - a. Pembangunan Box Culvert Desa Kuapan.
 - b. Pembangunan Box Culvert Desa Bandur Picak.
 - c. Pembangunan Box Culvert Desa Gunung Malelo
 - d. Pembangunan Jembatan Besi desa makmur sejahtera
 - e. Pembangunan Jembatan Besi Desa Muara Selaya
 - f. Pembangunan Turap Kelurahan Pulau
 - g. Pembangunan Turap Desa Merangin
 - h. Pembangunan Turap Desa Muara Uwai
 - i. Pembangunan Turap Desa Danau Bingkuang
 - j. Pembangunan Turap Desa Gema
- b. Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan SKPD selama 12 bulan.
- c. Pusat Pengendalian Operasional Dalam Siaga Bencana KARHUTLA Penanggulangan Kabut Asap Akibat Karhutla.

Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Kabut Asap Akibat Karhutla di Kabupaten Kampar dengan melakukan sosialisasi, patroli, piket dengan mendirikan posko karlahut hingga penanganan pemadaman kebakaran lahan. Terlaksananya kegiatan Pusat Pengendalian Operasional Dalam Siaga Bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

- KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

4.2.9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

a. Pendataan dan Monitoring Daerah Bencana Alam

Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Monitoring Daerah Rawan bencana, dengan melakukan survey lokasi dan mendata daerah rawan bencana berdasarkan Hasi Pendataan Kabupaten Kampar pada akhir tahun 2018, terjadi curah hujan dengan intensitas cukup tinggi yang mengakibatkan bencana banjir ditambah lagi struktur tanah dikabupaten Kampar sangat labil dan selalu terjadi abrasi sehingga mengakibatkan rusaknya fasilitas umum seperti longsor terhadap badan jalan, terjadinya abrasi Tebing sungai dan Jembatan Ambruk yang disebabkan oleh bencana banjir tersebut. Oleh kerana dilakukan pendataan proposal yang masuk dari Desa dan Kecamatan.

b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Dana Bantuan Hibah APBN)

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Dana Bantuan Hibah APBN) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Turap Desa Kelurahan Pulau
- b. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Turap Desa Muara Uwai
- c. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Turap Desa Merangin
- d. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Jembatan Besi Desa Kualu Nenas
- e. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Box Culvert Desa Kuapan

- f. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Turap Desa Danau Bingkuang
- g. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Box Cullvert Desa Bandur Picak
- h. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Box Culvert Desa Gunung Malelo
- i. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Jembatan Besi Desa Makmur Sejahtera
- j. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Turap Desa Gema
- k. Perencanaan Teknis RR Pembangunan Jembatan Besi Desa Muara Selaya
- l. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Turap Kelurahan Pulau
- m. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Turap Desa Muara Uwai
- n. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Turap Desa Merangin
- o. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Jembatan Besi Desa Kualu Nenas
- p. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Box Culvert Desa Kuapan
- q. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Turap Desa Danau Bingkuang
- r. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Box Culvert Desa Bandur Picak
- s. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Box Culvert Desa Gunung Malelo
- t. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Jembatan Besi Desa Makmur Sejahtera
- u. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Turap Desa Gema
- v. Pengawasan/ Supervisi RR Pembangunan Jembatan Besi Muara Selaya
Pembangunan Jembatan besi Desa Kualu Nenas
- k. Pembangunan Box Culvert Desa Kuapan.
- l. Pembangunan Box Culvert Desa Bandur Picak.
- m. Pembangunan Box Culvert Desa Gunung Malelo
- n. Pembangunan Jembatan Besi desa makmur sejahtera

- o. Pembangunan Jembatan Besi Desa Muara Selaya
- p. Pembangunan Turap Kelurahan Pulau
- q. Pembangunan Turap Desa Merangin
- r. Pembangunan Turap Desa Muara Uwai
- s. Pembangunan Turap Desa Danau Bingkuang
- t. Pembangunan Turap Desa Gema

Pekerjaan tersebut telah selesai sesuai prosedur kontrak yang berlaku.

c. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)

Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) merupakan giat dari Tim Reaksi Cepat (TRC) tentang kejadian bencana di Kabupaten Kampar Tahun 2018. Tim Reaksi Cepat PUSDALOPS PB mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran saran yang tepat dalam upaya penanganan.

Giat Tim Reaksi Cepat tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan Tahun 2018 diuraikan secara jelas pada laporan kegiatan ini diantaranya : rekapitulasi kejadian, waktu dan tempat kejadian diantaranya :

1. Hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 Orang Tenggelam di jembatan danau bingkuang.
2. Hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 Kebakaran di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah seluas 1 Hekter.
3. Hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 Kebakaran di Kecamatan XIII Koto Kampar Desa Balung seluas 10 Hekter.
4. Hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 terjadi tanah longsor di Kecamatan Kuok Desa Balung.
5. Hari Minggu Tanggal 11 Februari 2018 terjadi Kebakaran Di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah Seluas 3 Hekter.
6. Hari Selasa Tanggal 13 Februari 2018 terjadi Kebakaran Di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah Seluas 2 Hekter.

7. Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018 terjadi kebakaran lahan jalan seputaran ujung Sei. Pantau di kecamatan Kampar Kiri seluas 2 Hekter.
8. Hari Rabu Tanggal 07 Maret terjadi banjir di Kec. Tambang Desa Tarai Bangun adapaun keluarga yang terdampak yaitu 490 KK.
9. Hari Rabu Tanggal 14 Maret 2018 terjadi kebakaran di Kecamatan Bangkinang Desa Langgini kebakaran tersebut melenyapkan tumpukan kayu di belakang kantor bupati lama.
10. Hari Kamis Tanggal 05 April 2018 terjadi kebakaran di Kecamatan Bangkinang Kota Jl. Datuk Seribu Garang Kelurahan Langgini lahan di jalan Datuk Panglima seribu garang dibelakang kejaksanaan bangkinang.
11. Hari Senin Tanggal 09 April 2018 terjadi banjir di kecamatan Kampar Kiri Desa Sei Paku banjir di akibatkan oleh curah hujan tinggi selama 2 (dua) hari.
12. Hari Senin Tanggal 09 April 2018 Terjadi Banjir di Kecamatan Gunung Sahilan Desa Gunung Sahilan diakibatkan curah hujan tinggi, ketinggian air mencapai 50 cm.
13. Hari Selasa tanggal 10 April 2018 terjadi kebakaran di Kecamatan Siak Hulu di Desa Baru yaitu kebakaran gudang PT. Raja Matras Sumatra (Kaisar)
14. Hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 terjadi longsor di Kecamatan Tapung di Desa Kota Garo yang mengakibatkan kerusakan jembatan jalan lintas raya pekanbaru-kota garo.
15. Hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 terjadi kebakaran di kecamatan Bangkinang kelurahan Langgini yaitu kebakaran rumah mantan Kadis Pendidikan an. Alfisyahri.
16. Hari Senin tanggal 16 April 2018 banjir di Kecamatan Kampar Kiri Desa Domo ketinggian air berkisar 30-50 cm
17. Hari Kamis Tanggal 19 April 2018 longsor di kecamatan Kuok yaitu KM 77-78 Desa Merangin
18. Hari Kamis Tanggal 19 April 2018 banjir di Kecamatan Kampar Kiri Desa Sungai Paku, banjir di akibatkan oleh tinnginya curah hujan yang tinggi berkisar 50 cm.

19. Hari Kamis tanggal 20 April 2018 longsor di Kecamatan Kampar Kiri di Desa Kuntu Darussalam yang mengakibatkan ambruknya jalan penghubung masyarakat.
20. Hari Senin tanggal 30 April 2018 kebakaran di Kecamatan Kuok Desa Merangin yaitu kebakaran lahan di pinggir jalan Negara KM 81-82 PLTA Koto Panjang
21. Hari Senin Tanggal 30 April 2018 kebakaran di Kecamatan Kuok Desa Pulau Jambu yaitu kebakaran rumah akibat arus pendek listrik.
22. Hari Rabu Tanggal 09 Mei 2018 kebakaran di Kecamatan Bangkinang Kota kelurahan langgini yaitu jalan Datuk Seribu Garang Belakang Kantor DPRD Kab. Kampar.
23. Hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 kebakaran di kecamatan bangkinang Desa Bukit Payung lahan sawit seluas 1 Hekter.
24. Hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 kebakaran di kecamatan salo Desa Salo Timur yaitu lahan seluas $\frac{1}{4}$ Hekter.
25. Hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 banjir di kecamatan Kuok Desa Silam yang menggenangi 50 KK.
26. Hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 angin Putting Beliung di Kecamatan Bangkinang Kota kelurahan langgini yang mengakibatkan pohon tumbang di jalan pramuka RT 01 / RW 05 Langgini pukul 23.00 WIB.
27. Hari Minggu Tanggal 10 Juni 2018 kebakaran Kec. Kampar Kiri Desa Tibun yaitu lahan seluas Hekter.
28. Hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 angin Putting Beliung di Kecamatan Tambang Desa Aur Sati mengakibatkan satu unit rumah rusak.
29. Hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 Banjir di Kecamatan Gunung Sahilan Desa Gunung Sahilan.
30. Hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 Banjir di Kecamatan Gunung Sahilan Desa Sahilan Darussalam.
31. Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 kebakaran di kecamatan Tambang Desa Tarai Bangun yaitu kebakaran rumah.
32. Hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 kebakaran di kecamatan Kampar Kiri Hilir Kelurahan Sungai Pagar yaitu kebakaran rumah

33. Hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 kebakaran di Kecamatan Salo Desa Salo Timur yaitu lahan dipinggir jalan Desa.
34. Hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Kebakaran lahan di Kecamatan Salo Desa Salo timur.
35. Hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Kebakaran lahan di Kecamatan XIII Koto Kampar Desa Tanjung Alai.
36. Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Kebakaran lahan di Kecamatan XIII Koto Kampar Desa Tanjung Alai.
37. Hari Rabu Tanggal 25 Juli 2018 kebakaran Rumah di Kecamatan XIII Koto Kampar di Desa Binamang.
38. Hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 longsor di Kecamatan Kampar Kiri Desa Domo adapun kerusakan yang terjadi 1 (satu) unit rumah terbawa, 5 (lima) unit rumah terancam terbawa longsor dan menutupi bahu jalan desa penghubung antar desa 1/2 Meter.
39. Hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018 kebakaran rumah di Kecamatan Siak Hulu Desa Siak Hulu Desa Teratak Buluh.
40. Hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018 Angin Putting Beliung di Kecamatan Tapung Desa Mukti Sari yang mengakibatkan rusaknya 3 (tiga) unit bangunan Sekolah yaitu : SDN 013, SDN 027 dan SMPN 005.
41. Hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 Kebakaran lahan di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah yaitu lahan di Jl. Rusa dan Jl. Riau.
42. Hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 Kebakaran lahan di Kecamatan Bangkinang Kota Desa Kumantan yaitu lahan Jl. Cik Ditiro RT/RW 04/03.
43. Hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2018 kebakaran Lahan di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah yaitu lahan di Jl. Riau.
44. Hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Kebakaran di Kecamatan Siak Hulu Desa Kubang yaitu Tempat Pembuangan Sampah.
45. Hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 kebakaran di Kecamatan Bangkinang Kota Desa Kumantan lahan di Jl. Cik Ditiro.
46. Hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 di Kecamatan Salo Desa Siabu kebakaran lahan.

47. Hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 kebakaran di Kecamatan Tapung Hulu Desa Danau Lancang lahan di dusun IV.
48. Hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Kebakaran Lahan di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah.
49. Hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Kebakaran Lahan di Kecamatan Tapung Desa Bencah Kelubi lahan Korem.
50. Hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 kebakaran lahan di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah lahan Jl. Riau.
51. Hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 kebakaran di Kecamatan Tapung Desa Danau Lancang.
52. Hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 kebakaran lahan di Kecamatan Tapung Desa Bencah Kelubi.
53. Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 kebakaran lahan di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah.
54. Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 kebakaran lahan di Kecamatan Tapung Desa Danau Lancang.
55. Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 kebakaran lahan di Kecamatan Tapung Desa Bencah Kelubi.
56. Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 kebakaran lahan di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah lahan Jl. Garuda Sakti, Areal lahan Ex. Pr. Dwi Prima.
57. Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 kebakaran di Kecamatan Tapung Desa Danau Lancang.
58. Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 kebakaran di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah.
59. Hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 Kebakaran Di Kecamatan Bangkinang Kota Desa Ridan Permai.
60. Hari Jum'at Tanggal 24 Agustus 2018 Kebakaran di Kec. XIII Koto Kampar Desa Tanjung Alai.
61. Hari Minggu Tanggal 26 Agustus 2018 kebakaran di Kecamatan Bangkinang kota Desa Ridan Permai.
62. Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 kebakaran di Kecamatan Tambang Desa Rimbo Panjang
63. Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Kebakaran di Kecamatan Kota Desa Ridan Permai yaitu Kavlingan Perum YLZ.

64. Hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 Kebakaran Lahan di Kecamatan Tapung Desa Karya Indah.
65. Hari Senin Tanggal 27 Agustus 2018 Kebakaran di Kecamatan Tambang Desa Tarai Bangun.
66. Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 di Kecamatan Bangkinang Kota kelurahan Langgini jl. Tuanku Tambusai.
67. Hari Selasa Tanggal 04 September 2018 longsor di Kecamatan Kampar Utara Desa Sei. Tonang jl. Amblas akibat gorong-gorong pecah di RT/RW 02/02
68. Hari Jum'at Tanggal 07 September 2018 kebakaran lahan di kecamatan Tapung Desa Karya Indah lahan di Jl. Kijang Putih.
69. Hari Minggu Tanggal 16 September 2018 Kebakaran Ruko di Kecamatan Tapung Hulu Desa Kasikan.
70. Hari Selasa Tanggal 25 September 2018 Kebakaran di Kecamatan Bangkinang Kelurahan Bangkinang lahan di belakang universitas pahlawan tuanku Tambusai bangkinang.
71. Hari Kamis Tanggal 27 September 2018 Kebakaran di Kecamatan Salo Desa Salo Timur yaitu kebakaran tumpukan sampah yang hampir membakar lahan di jalan lingkar dekat sungai hijau.
72. Hari Jum'at tanggal 28 September 2018 Kebakaran di Kecamatan Bangkinang Desa Sungai Jernih.
73. Hari Jum'at Tanggal 12 Oktober 2018 Banjir bandang di Kecamatan Tapung Desa Danau Lancang.
74. Hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 Angin Putting Beliung di Kecamatan Kampar Desa Pulau Tinggi yang terdampak 4 Unit rumah.
75. Hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 longsor di Kecamatan Kuok Desa Merangin yaitu Jalan Lintas Riau- Sumbar KM 77-83.
76. Hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Banjir di Kecamatan Kuok Desa Batu Langka Kecil
77. Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 Longsor di kecamatan Bangkinang Kota Kelurahan Langgini.
78. Hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2018 orang hilang/tenggelam di Kecamatan Tapung Hulu Desa Danau Lancang.

79. Hari Sabtu Tanggal 03 November 2018 Banjir di Kecamatan Koto Kampar Hulu Desa Tanjung.
80. Hari Sabtu Tanggal 03 November 2018 Banjir di Kecamatan Kampar Kiri.
81. Hari Kamis Tanggal 15 November 2018 banjir di Kecamatan Perhentian Raja Desa Pantai Raja merendam 1 (satu) gedung sekolah SMA 1 Perhentian Raja terdiri dari 15 lokal dan jumlah siswa 515 orang, dengan ketinggian air 60-80 cm.
82. Hari Kamis Tanggal 15 November 2018 banjir di Kecamatan Tapung Hulu Desa Danau Lancang.
83. Hari Kamis Tanggal 15 November 2018 longsor di Kecamatan Kuok Desa Merangin yaitu tebing jalan lintas Riau-Sumbar KM 81.
84. Hari Minggu Tanggal 18 November 2018 Angin Putting Beliung di Kecamatan Kampar Desa Batu Belah merusak fasilitas parkir dan meenimpa 12 unit sepeda motor serta merusak baleho informasi dan flafon depan RSUD Bangkinang.
85. Hari Jum'at 23 November 2018 Banjir di Kecamatan Gunung Sahilan Desa Gunung Sahilan yang merendam 150 KK.
86. Hari Jum'at 23 November 2018 Banjir di Kecamatan Gunung Sahilan Desa Sahilan Darussalam yang merendam 154 KK.
87. Hari Jum'at 23 November 2018 Banjir di Kecamatan Kampar Kiri Desa Lipat Kain Selatan yang merendam 25 KK.
88. Hari Rabu Tanggal 28 November 2018 longsor di Kecamatan Bangkinang Kota Kelurahan langgini longsor di tebing jalan soebrantas mengakibatkan robohnya 1 unit Rumah atas nama Abdul Jumrah dan 1 Unit Ruko bertingkat.
89. Hari Minggu Tanggal 02 Desember 2018 orang hilang/tenggelam di Kecamatan Kuok Desa Merangin yang disebabkan oleh kecelakaan tunggal 1 unit mobil inova dengan Nopol B 1142 CFX terperosok ke sungai Kampar, dimana terdapat 4 orang Penumpang 2 orang meninggal dunia, 2 orang lagi selamat, kecelakaan di duga akibat supir mengantuk.
90. Hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 Banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang mengakibatkan beberapa desa di

kEcamatan Kampar Kiri terendam antara lain : Desa Mentulik, Desa Rantau Kasih, Desa Gading permai, Desa Sei Bungo yang merendam 883 KK dari 4 Desa.

91. Hari Minggu Tanggal 09 Desember 2018 Banjir di Kecamatan Bangkinang yang merendam beberapa desa antara lain : Kel. Pasir Sialang, Desa Pulau Lawas, Desa Muara Uwai, Desa Binuang yang merendam 20 KK.
92. Hari Minggu Tanggal 09 Desember Tahun 2018 Banjir di Kecamatan Kampar yang merendam Desa Simpang Kubu, Desa Batu Belah, Desa Ranah Baru, Desa Tanjung Berulak, Desa Tanjung Rambutan, Desa Limau Manis, Desa Penyasawan, Desa Rumbio, Desa Padang Mutung, Desa Pulau Jambu, Desa Pulau Tinggi, Desa Koto Tibun yang merendam 1.522 KK.
93. Hari Minggu Tanggal 09 Desember 2018 Banjir di Kecamatan Kampar Utara yang merendam Desa Sendayan, Desa Kampung Panjang, Desa Sawah, Desa Sei Jalau, Desa Muara Jalai, Desa Sungai Tonang, Desa Naga Beralih yang merendam 503 kk.
94. Hari Minggu Tanggal 09 Desember 2018 Banjir di Kecamatan Rumbio Jaya yang merendam beberapa desa anantara aalaian : Desa pulau payung, Desa Alam panjang, Desa Simpang Petai, Desa Teratak yang merendam 560 KK.
95. Hari Minggu Tanggal 09 Desember 2018 Banjir di Kecamatan Kampa yang merendam Desa Pulau Rambai, Desa sungai tarap, Desa Tanjung Tarab, Desa Tanjung Bungo, Desa Koto Perambahan, Desa Pulau Birandang yang merendam 995 KK.
96. Hari Minggu Tanggal 09 Desember 2018 Banjir Kecamatan Tambang yang merendam Desa Tambang, Desa Kuapan, Desa Aur Sati, Desa Gobah, Desa Padang Luas, Desa Terantang, Desa Kualu, Desa Teluk Kenidai, Desa Parit Baru, Desa Kemang Indah, Desa Pulau Permai, Desa Palung Raya yang merendam 5.901 KK
97. Hari Minggu Tanggal 09 Desember 2018 Banjir di Kecamatan Siak Hulu yang merendam beberapa desa antara lain : Desa Buluh Cina, Desa Lubuk Siam, Desa Tanjung Balam dan Desa Teratak Buluh yang merendam 1.899 KK

98. Hari Minggu Tanggal 09 Desember 2018 Banjir Kecamatan Perhentian Raja Desa Kampung Pinang yang merendam 510 KK.
99. Hari Minggu Tanggal 09 Desember 2018 Banjir di Kecamatan Gunung Sahilan antara lain Desa Sahilan Darusalam, Desa Gunung Sahilan, Desa Kebun Durian, Desa Subarak dan Desa Sungai Lipai yang merendam 239 KK.
100. Hari Minggu Tanggal 09 Desember 2018 Banjir Kampar Kiri antara lain Desa Padang Sawah, Desa Sungai Paku, Desa Lipat Kain Utara, Desa Teluk Paman, Desa Sei. Geringging, Desa Tanjung Harapan, Desa Teluk Paman Timur Desa Sei. Rambai dan Desa Lipat Kain Selatan dengan jumlah KK yang terendam Yaitu : 768 KK.

Dari segi sarana transportasi pendukung untuk penanggulangan bencana, terasa sangat minim antara lain hanya memiliki:

1. 1 unit mobil Dapur Lapangan (BNPB).
2. 1 unit mobil Komando (BNPB)
3. 1 unit mobil Double Cabin (APBD)
4. 4 unit sepeda motor Trail (BNPB)
5. 4 Unit Perahu Karet (BNPB) dalam keadaan rusak berat.

Tabel T-C.29. : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD 2017 s/d 2022 Tahun Berjalan Kabupaten Kampar

Nama PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode | Usulan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target kinerja capaian Program Renstra PD Tahun 2017-2022 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|------|--|---|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD tahun (n-2) | Realisasi Renja PD tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Rentsra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPBD Kabupaten Kampar | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Jasa Perbaikan peralatan kerja | Jumlah perbaikan peralatan kerja | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|------|
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | Jumlah Jasa Tenaga Harian Lepas | | | | | | | | |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | | | | 24 bulan | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 4 Unit | 24 bulan | | | | | | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 60 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
| | Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset | Jumlah barang hibah dari BNPB | 9 Orang | 1 Orang | 0 Paket | 0 Paket | 60% | 0 Paket | 3 Paket | 60% |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | |
| | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | 15 Laporan | 6 Laporan | | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| 5 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana | | | | | | | | | |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| | Pusat pengendalian operasional dalam rangka siaga bencana Karhutla | Jumlah pengendalian operasional dalam rangka siaga bencana Karhutla | 21 Kecamatan | 8 Kecamatan | 2 Kecamatan | 2 Kecamatan | 100% | 2 Kecamatan | 10 Kecamatan | 47% |
| 6 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | | | | | | | | | |
| | Pendataan dan monitoring daerah rawan bencana | Jumlah pendataan dan monitoring daerah rawan bencana | 2 Kecamatan | 2 Kecamatan | 5 Kecamatan | 3 Kecamatan | 60% | 21 Kecamatan | 19 Kecamatan | 38% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| | Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana (Dana Bantuan Hibah APBN) | Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana | 22 Paket | 22 paket | 4 paket | 4 paket | 0% | 0 paket | 64 paket | 128% |
| | Peningkatan kapasitas tanggap darurat | Jumlah kapasitas tanggap darurat | 14 Kegiatan | 7 Kegiatan | 2 Kejadian | 2 Kejadian | 100% | 3 Kejadian | 6 Kejadian | 60% |
| | Penyuluhan dan Pelatihan Relawan Bencana | Terlatihnya 2 Desa di Dua Kecamatan | 120 Orang | 60 Orang | 2 Desa | 2 Desa | 100% | 0 Desa | 6 Desa | 60% |
| | pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencna (PUSDALOPS-PB) | Jumlah rapat koordinasi teknis penanggulangan bencana | 26 Kecamatan | 13 Kecamatan | 2 Kali | 2 Kali | 100% | 2 Kali | 10 Kali | 100% |

A. Program yang telah memenuhi target

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya antara lain :
 - i. Jasa perbaikan peralatan kerja
 - ii. Penyediaan alat tulis kantor
 - iii. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - iv. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - v. Penyediaan makanan dan minuman
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - ii. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - i. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Keterangan :

Program diatas telah mencapai target karena dana yang disediakan mencukupi untuk kebutuhan yang direncanakan

Masyarakat yang menerima informasi atau sosialisasi kebencanaan telah mencapai target yaitu sebanyak 250 orang (selama 5 tahun). Target tercapai karena adanya kerjasama dengan Direktur Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sharing program dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dan alokasi dana dari APBD Kampar untuk kegiatan Pelatihan relawan bancana.

B. Program yang belum memenuhi target

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; kegiatannya antara lain :
 - i. Pengadaan pakaian kerja lapangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - i. Paket Pengiriman Barang Hibah dari BNPB
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - i. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

- i. Forum Pertemuan dalam rangka Bulan PRB
 - ii. Pusat pengendalian operasional dalam rangka siaga bencana karlahut
 - iii. Perencanaan strategis penanggulangan bencana
5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; kegiatannya antara lain :
- i. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
 - ii. Pendataan dan monitoring daerah rawan bencana
 - iii. Peningkatan kapasitas tanggap darurat
 - iv. Pembinaan penyelenggaraan tanggap darurat
 - v. Pelatihan siaga bencana pada kecamatan rawan bencana
 - vi. Pembuatan Perda Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
6. Program Pencegahan/Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan
- i. Penyelenggaraan HUT BPBD

Keterangan :

Program/kegiatan diatas tidak mencapai target sesuai yang direncanakan dari awal 2011 dikarenakan dana yang disediakan dari APBD Kabupaten Kampar belum optimal (belum mencukupi kebutuhan).

Jumlah regulasi yang disusun tidak tercapai seharusnya pada akhir tahun 2016 tersedia 6 Perda, sedangkan yang tercapai hanya 2 yaitu :

- a. Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana
- b. Peraturan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sedangkan Peraturan Daerah yang belum dimiliki :

- a. Perda Forum Pengurangan Resiko Bencana
- b. Aturan Penyebaran Informasi Kebencanaan
- c. Peraturan Daerah Rencana Penanggulangan Bencana

- d. Peraturan Daerah Tata Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana
- e. Peraturan Daerah Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir
- f. Peraturan Daerah Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Karlahut
- g. Peraturan Daerah Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Longsor
- h. Peraturan Daerah Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Kekeringan

Jumlah peraturan yang dimiliki belum terpenuhi sampai pada akhir tahun ke 5.

C. Program yang melebihi target

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, kegiatannya adalah :

- i. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melebihi target dari yang direncanakan karena tingkat kerusakan yang tinggi serta mendapat bantuan pengerjaan/perbaikan dari alokasi dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.2.1 Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas/Badan dan kantor Kabupaten Kampar. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang *Ex Officio* adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Lingkungan Badan Kabupaten Kampar, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Terletak di kompleks Pemda Kabupaten Kampar Jl. Lingkar Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kampar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggapan darurat dan pasca bencana. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Landasan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Uraian tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas/Badan dan Kantor di Kabupaten Kampar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

1. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut dengan Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

2. Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas kepala BPBD sehari-hari;
3. Kepala Pelaksana melaksanakan system pengendalian intern, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok BPBD Mempunyai Tugas :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat. Efektif dan efisien ; dan
- b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Badan penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan (Ex. Officio Sekretaris Daerah).
- 2. Kepala Pelaksana
- 3. Sekretariat terdiri dari :
 - 3.1. Sub Bagian Perencanaan
 - 3.2. Sub Bagian Keuangan
 - 3.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - 4.1. Kepala Seksi Pencegahan
 - 4.2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
- 5. Bidang Kedaruratan dan Logistik yang terdiri dari :
 - 5.1. Kepala Seksi Kedaruratan
 - 5.2. Kepala Seksi Logistik
- 6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari :
 - 6.1 Kepala Seksi Rehabilitasi
 - 6.2 Kepala Seksi Rekonstruksi
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Damkar
 - 7.1 Kepala UPTB
 - 7.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - 7.3 Petugas-petugas Operasional/kelompok fungsional

Sumber Daya OPD

I. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan perlengkapan

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Kampar Pada bulan Februari Tahun 2019 tercatat sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) orang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil : 40 Orang
- b. Tenaga Kerja Harian Lepas : 14 Orang

Secara terperinci kondisi sumber aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dapat digambarkan pada uraian sebagai berikut :

2. Tingkat Pendidikan Personil

Tingkat pendidikan personil/pegawai BPBD Kabupaten Kampar dapat digambarkan pada Tabel I berikut ini :

Tabel II.1
Kondisi Personil BPBD Kabupaten Kampar
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL | PNS (Orang) | THL (Orang) | JUMLAH (Orang) | PERSEN (%) |
|----|---------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 1. | S 2 | 6 | - | 6 | 11 |
| 2. | S 1 | 19 | 9 | 28 | 51.9 |
| 3. | Akademi/ Sarjana Muda | - | - | - | - |
| 4. | SMA/ Sederajat | 11 | 5 | 16 | 29.7 |
| 5. | SMP/ Sederajat | 4 | - | 4 | 7.4 |
| 6. | SD/ Sederajat | - | - | - | - |
| | TOTAL | 40 | 14 | 54 | 100 |

Dari Tabel I diatas dapat diketahui bahwa pegawai BPBD Kabupaten Kampar yang berpendidikan pasca sarjana (S2) sebanyak 6 orang atau 11%, yang berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 28 orang atau 51,9%, tamatan Diploma 3 sebanyak 0 Orang, tamatan SMA/Sederajat sebanyak 16 orang atau 29,7%, dan tamatan SMP sebanyak 4 Orang atau 7,4%. Jika dilihat dari keseluruhan pendidikan pegawai sebanyak 34 orang atau 62.9% berasal dari tamatan perguruan tinggi (S1 dan S2).

1. Pangkat/golongan personil

Kondisi kepangkatan/golongan pegawai BPBD Kabupaten Kampar posisi Agustus 2018 dapat digambarkan pada Tabel I.2 berikut ini :

Tabel II.2

Kondisi Pegawai BPBD Kabupaten Kampar
Menurut Pangkat/golongan Awal Tahun 2020

| NO | GOLONGAN/ PANGKAT | JUMLAH (Orang) | PERSENTASE (%) |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Pembina Utama Muda | 1 | 1,6 |
| 2 | Pembina | 4 | 6 |
| 3 | Penata Tk. I | 8 | 12 |
| 4 | Penata | 7 | 10,80 |
| 5 | Penata muda Tk. I | 3 | 4,70 |
| 6 | Penata Muda | 2 | 3 |
| 7 | Pengatur Tk. I | 2 | 3 |
| 8 | Pengatur | 5 | 7,90 |
| 9 | Pengatur Muda Tk. I | 2 | 3 |
| 10 | Pengatur Muda | 2 | 3 |
| 11 | Juru | 1 | 2 |
| 12 | Juru Muda Tk. I | 1 | 2 |
| 13 | Juru Muda | 2 | 2 |
| 14 | Tenaga Harian Lepas | 25 | 39 |
| | TOTAL | 65 | 100 |

Dilihat dari golongan/ kepangkatan, bahwa golongan terbanyak pada BPBD Kabupaten Kampar adalah golongan III sebanyak 20 orang atau 37,05%, pegawai golongan IV sebanyak 5 orang atau 9,3 % pegawai golongan II sebanyak 11 orang sebanyak

20,35% golongan I sebanyak 4 orang atau 7,4% dan non golongan (THL) sebanyak 14 orang atau 25,90 %

2. Pendidikan dan Latihan Penjenjangan

Pendidikan dan latihan (diklat) penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai BPBD Kabupaten Kampar posisi 2019 s/d 2020, dapat digambarkan pada tabel I.3 dibawah ini :

Tabel II.3
Kondisi Pegawai BPBD Kabupaten Kampar Menurut
Diklat Penjenjangan 2017 s/d 2018

| NO | JENIS DIKLAT STRUKTURAL | JUMLAH (Orang) | PERSENTASE (%) |
|----|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. | SPAMEN | 1 | 4,14 |
| 2. | SPAMA (DIKLAT PIM III) | 6 | 24,84 |
| 3. | ADUMLA (DIKLATPIM IV) | 9 | 36,44 |
| 4. | ADUM/SPADA | 8 | 32,72 |
| | TOTAL | 24 | 100 |

Dari 44 orang jumlah pegawai pada BPBD Kabupaten Kampar yang telah mengikuti pendidikan dan latihan penjenjangan adalah sebanyak 24 orang atau 54%. Dari jumlah 24 orang tersebut, sebanyak 8 orang telah mengikuti diklat adum/spada, sebanyak 9 orang telah mengikuti diklat Adumla (Diklatpim IV), 6 orang yang telah mengikuti Spama (diklatpim III) dan sebanyak 1 orang pegawai BPBD yang telah mengikuti Spamen.

3. Pendidikan Teknis Fungsional

Pendidikan teknis fungsional yang diikuti oleh Pegawai BPBD Kabupten Kampar posisi agustus 2020, dapat digambarkan pada tabel I.4 dibawah ini :

Tabel II. 4
Kondisi Personil BPBD Kabupaten Kampar
Menurut Pendidikan teknis Fungsional Pada Agustus Tahun
2019

| NO | JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH (Orang) | PERSENTASE (%) |
|----|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Kursus Manajemen Proyek | 5 | 25 % |
| 2. | Kursus Bendaharawan | 4 | 20 % |
| 3. | Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 20 % |
| 4. | Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | |
| | TOTAL | 13 | 65 % |

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 13 orang atau 65% dari total pegawai BPBD kabupaten Kampar yang telah mengikuti pendidikan dan latihan teknis fungsional. Dari Jumlah 13 orang tersebut hanya 5 orang atau 25 % yang mengikuti pendidikan kursus bendaharawan Proyek, 4 orang atau 20 % mengikuti kursus Bendaharawandan 4 orang atau 20 % mengikuti KursusPengadaan Barang dan jasa. Apabila mengacu kepada tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Kampar dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Maka Jumlah yang telah mengikuti Pendidikan dan LatihanTeknis fungsional dimaksud masih sangat sedikit sekali.

1. Cakupan (macam-macam pelayanan OPD)

Dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan (pra bencana) adalah :

- Menyusun peta rawan bencana sehingga memudahkan aparat dalam mendata daerah rawan bencana dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan tentang penanggulangan bencana
- Melaksanakan survei dan pendataandaerah-daerah yang rawan terjadi bencana.

Saat terjadinya bencana adalah :

- Memberikan bantuan logistik dan menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam penanggulang bencana.

Setelah terjadinya bencana adalah :

- Rehabilitasi dan rekonstruksi, setelah terjadinya bencana pada suatu daerah maka kerusakan yang terjadi akan

didata dan dibuat laporan untuk mengetahui apa saja kerusakan yang terjadi dan berapa nilai kerugian terhadap bencana tersebut serta membangun kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana.

2. Perkiraan besaran kebutuhan pelayanan OPD

Anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan penanggulangan bencana dalam 5 tahun yang di sepakati dalam Rencana Strategis Penanggulangan bencana ini adalah sebesar Rp.2.337.261.198.136,-

(Dua Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh satu Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah)

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Sekretariat Dialokasikan sebesar Rp. 63.948.213.873,- (Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)
- Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dialokasikan sebesar Rp. 23.342.707.999,-(Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- Bidang kedaruratan dan logistik dialokasikan sebesar Rp. 17.203.118.818 (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).
- Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan sebesar Rp. 48.617.759.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

3. Lokasi pengembangan pelayanan OPD

Diperkirakan hampir seluruh desa mempunyai Potensi rawan bencana di kabupaten kampar, berdasarkan data yang ada, jenis-jenis bencana yang sering terjadi antara lain:

- Banjir
- Kekeringan
- Angin Puting Beliung
- Tanah Longsor
- Kebakaran lahan dan hutan
- dan lain-lain

Adapun kecamatan yang berpotensi rawan bencana di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Bangkinang : Kelurahan Bangkinang, Kelurahan Langgini, Desa kumantan, Desa Ridan Permai (Banjir dan longsor)
- Salo : Desa Salo Timur, Desa Ganting dan Desa lainnya (Angin Puting Beliung)
- Bangkinang Barat : Desa Kuok (Longsor)
- Tapung Hulu : Desa tanah datar, Desa danau lancang (Banjir)
- Gunung sahilan :Desa Gunung Sahilan, Desa Sahilan Darusalam, Desa Kebun Durian, Desa Subarak, Desa Sei. Lipai (Banjir)
- Kampar kiri Hulu : Desa Batu Sanggar, Aur Kuning, Batu Sasak, Pangkalan Kapas, Kebun Tinggi, Pangkalan Serai, Terusan, Deras Tajak dan Tanjung Permai (Banjir dan Longsor)
- Kampar Kiri : Desa Kuntu, Padang sawah, Domo, IV Koto Setingkai, Teluk Paman, Geringging, Sungai Paku, Muara Malaya, Sei Rambai, Tanjung Harapan, Sungai Raja, Kuntu Darusalam, Desa Tanjung Mas, Sungai Liti, Teluk Paman Timur, Sungai harapan Banjir dan Longsor)
- Siak Hulu : Desa Teratak Buluh, Buluh Cina (Banjir)
- Kampar Kiri Hilir : Desa Mentulik, Gading Permai, Bangun Sari, Sei Bungo, Rantau Kasih
- Bangkinang Seberang : Kelurahan Pulau, Desa Ganting, Binuang, Muara Uai, Pulau Lawas (Angin Puting Beliung)

- Tambang : Desa Aur Sati, Teluk Kenidai (Banjir)
- Perhentian Raja : Desa Kampung Pinang (Banjir)
- Kampar Timur : Semua desa berpotensi terjadi angin puting beliung
- Tapung : Semua desa berpotensi terjadi angin puting beliung
- XIII Koto Kampar : Semua desa berpotensi terjadi angin puting beliung
- Kampar Utara : Semua desa berpotensi terjadi angin puting beliung dan Banjir
- Koto Kampar Hulu : Semua desa berpotensi terjadi angin puting beliung
- Tapung Hilir : Semua desa berpotensi terjadi angin puting beliung
- Kampar Kiri Tengah : Semua desa berpotensi terjadi angin puting beliung
- Rumbio Jaya : Semua desa berpotensi terjadi angin puting beliung
- Kampar : Semua desa berpotensi terjadi angin puting beliung

2.2.5. Perlengkapan Kantor

Dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, didukung dengan perlengkapan kantor seperti Komputer, Printer, Notebook, dan mesin Foto Copy, kendaraan dinas bagi pejabat eselon II, serta jaringan Wifi untuk mempermudah akses informasi global. Disamping itu BPBD Kabupaten Kampar didukung dengan perlengkapan khusus dalam penanggulangan bencana, antara lain peralatan teknologi dan informasi pada Pusat Pengendalian Operasi Lapangan (PUSDALOPS) serta peralatan lainnya dan

dilengkapi dengan Mobil Rescue, Mobil Dapur Lapangan, Mobil Damkar, Motor Trail, Perahu Karet serta bahan-bahan logistic dan kelengkapan untuk bantuan bagi korban bencana.

**Tabel T-C.30 : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021**

| NO | Indikator *) | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis | |
|----|--|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | | Tahun n-2 2017 | Tahun n-1 2018 | Tahun n 2019 | Tahun n+1 2020 | Tahun 2019 | Tahun 2021 | Tahun 2019 | Tahun 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Terlaksananya jasa komunikasi , sumber daya air dan Listrik | | Terlaksananya Jasa | 8 | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | |
| 2 | Terlaksananya operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan | | Jumlah titik api dan sebaran luas kebakaran hutan dan lahan | 5 Kecamatan | 5 Kecamatan | 5 kecamatan | 5 kecamatan | 5 Kecamatan | 0 Kecamatan | 5 kecamatan | 5 kecamatan | | |
| 3 | Terlaksananya perencanaan strategis penanggulangan bencana | | jumlah perencanaan kebencanaan yang strategis dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 dokumen | | |
| 4 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk meminimalisir resiko bencana | | Jumlah lolasi tersosialisasi mitigasi bencana/ pemahaman untuk memperkecil atau mempersempit resiko bencana | 5 Kecamatan | 5 kecamatan | 5 kecamatan | 5 kecamatan | 5 Kecamatan | 0 Kecamatan | 5 kecamatan | 7 kecamatan | | |
| 5 | Terdatanya daerah rawan bencana | | Jumlah pendataan daerah rawan | 21 kecamatan | 21 kecamatan | 21 kecamatan | 21 kecamatan | 21 kecamatan | 3 Kecamatan | 21 kecamatan | 21 kecamatan | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---|
| | | | bencana | | | | | | | | | |
| 6 | Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana | | Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana | 5 Paket | 12 paket | 8 paket | 2 paket | 0 Paket | 0 Paket | 8 paket | 2 paket | Perka No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana |
| 7 | Terkoordinasinya operasional tanggap darurat di lokasi bencana | | Terpenuhinya operasional tanggap darurat di lokasi bencana | 3 Kejadian | 7 paket | 7 paket | 15 paket | 3 Kejadian | 1 Kejadian | 7 paket | 15 paket | Perka BNPB No 6 Ta 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai; |
| 8 | Terselenggara pelatihan tenaga relawan bencana | | Berkwalitasnya tenaga relawan | 60 Relawan | 145 relawan | 80 relawan | 60 relawan | 60 Relawan | 0 Relawan | 80 relawan | 60 relawan | |
| 9 | Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap risiko bencana | | Tersedianya tenaga relawan yang terampil di daerah rawan bencana | 40 Relawan | 50 relawan | 220 relawan | 50 relawan | 0 Relawan | 0 Relawan | 220 relawan | 50 relawan | |
| 10 | Terkoordinasinya pencegahan bencana dalam Kabupaten Kampar | | Terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan dan pencegahan bencana | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 0 Laporan | 1 laporan | 1 laporan | Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil penelitian dalam pemetaan resiko bencana Kabupaten Kampar dengan Karakteristik fisik alami yang relatif rentan terhadap terjadinya bencana dan berkembangnya kegiatan perekonomian yang pesat diberbagai sector pembangunan berdampak terhadap meningkatnya risiko bencana di Kabupaten Kampar. Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yaitu Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, **Kampar**, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Sengingi, Siak, Dumai dan Kota Pekanbaru dikatagorikan sebagai Kabupaten/Kota dengan kelas rawan Tinggi. Wilayah Kabupaten Kampar merupakan salah Risiko bencana di Kabupaten Kampar dikelompokkan menjadi Risiko bencana akibat kejadian alam, risiko bencana akibat intervensi kegiatan manusia, dan atau risiko bencana akibat kejadian alam dan intervensi kegiatan manusia. Data historis kejadian bencana data hasil survey lapangan, tercatat selama ini menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) jenis bencana di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu banjir, Kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor/gerakan tanah, kekeringan, epidemic dan wabah penyakit, konflik social, kegagalan teknologi dan angin puting beliung. Kejadian bencana tersebut secara khusus menimbulkan risiko bagi kehidupan social-ekonomi masyarakat. Menurut informasi terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Petir dimasukan ke dalam salah satu potensi bencana di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Provinsi Riau merupakan daerah yang rawan terhadap bencana petir, terutama Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar diuraikan didalam analisa factor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana uraian berikut :

Faktor Lingkungan Internal

Tabel kekuatan

D. Kekuatan

| Nomor | Kekuatan | Skor |
|-------|--|------|
| 1 | Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 0,4 |
| 2 | Terbentuknya kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh Sekda selaku Ex. Officio | 0,2 |
| 3 | Ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai prioritas nomor 5 dalam RPJMD | 0,2 |
| 4 | Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 08 November 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar | 0,7 |
| 5 | Tersedianya Aparatur Sipil Negara | 0,2 |
| 6 | Tersedianya gedung perkantoran | 0,3 |
| 7 | Tersedianya sarana dan prasarana | 0,3 |
| 8 | Tersedianya dana dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar | 0,2 |
| | Jumlah | 2,5 |

E. Kelemahan

| Nomor | Kelemahan | Skor |
|-------|---|------|
| 1 | Belum memadainya Peraturan Daerah/aturan yang dimiliki sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar | 0,3 |
| 2 | Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka Penanggulangan Bencana | 0,5 |
| 3 | Kurang tercapainya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral | 0,2 |
| 4 | Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana | 0,5 |
| 5 | Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (kendaraan pendukung) | 0,5 |
| | Jumlah | 2 |

Faktor Lingkungan Eksternal

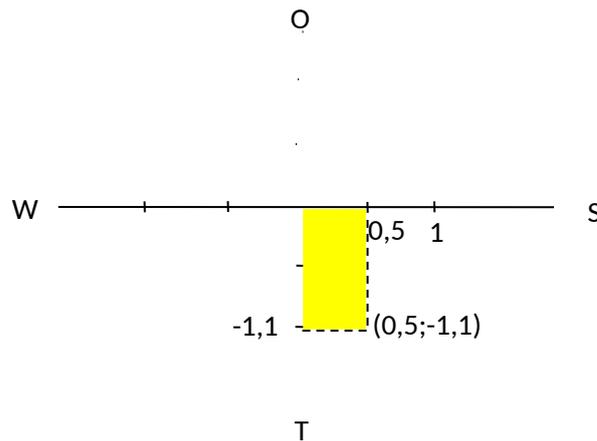
A. Peluang

| Nomor | Peluang | Skor |
|-------|---|------|
| 1 | Adanya komitmen pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 0,5 |
| 2 | Adanya keterlibatan dunia usaha dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. | 0,2 |
| 3 | Adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan dalam Penanggulangan Bencana | 0,5 |
| 4 | Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di Bidang Kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana | 0,5 |
| 5 | Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana antara TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah. | 0,5 |
| | Jumlah | 2,2 |

B. Ancaman

| Nomor | Ancaman | Skor |
|-------|---|------|
| 1 | Belum sepenuhnya penanganan bencana di Kabupaten Kampar dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 | 0,5 |
| 2 | Terbatasnya anggaran yang disediakan bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar | 0,5 |
| 3 | Terdapat 7 jenis bencana di Kabupaten Kampar | 0,5 |
| 4 | Tingkat ancaman bencana dalam kategori tinggi untuk Kabupaten Kampar | 1,5 |
| 5 | Dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana kategori tinggi | 0,5 |
| 6 | Dampak kerugian material dan ekonomi akibat bencana | 0,6 |
| 7 | Korban jiwa akibat bencana | 0,3 |
| | Jumlah | 3,3 |

$$\begin{aligned}
 \text{Kekuatan - kelemahan} &= 2,5 - 2 \\
 &= 0,5 (x) \\
 \text{Peluang - Ancaman} &= 2,2 - 3,3 \\
 &= -1,1 (y)
 \end{aligned}$$



| | | |
|---------|----------|-----------|
| y \ x | Kekuatan | kelemahan |
| Peluang | | |
| Ancaman | | |

Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dipublikasikan pada Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2016 di Manado adalah :

Beberapa prioritas yang bisa dilakukan untuk menentukan indeks Risiko Bencana Daerah, antara lain :

Prioritas I

Memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang efektif untuk membangun ketangguhan di daerah. Regulasi atau payung hukum yang harus dimiliki antara lain.

1. Memiliki Perda Penanggulangan Bencana
2. Memiliki Perda Penanggulangan Bencana Daerah

3. Memiliki Perda Forum Pengurangan Resiko Bencana
4. Memiliki Aturan Penyebaran Informasi Kebencanaan
5. Memiliki Perda Rencana Penanggulangan Bencana
6. Memiliki Perda Tata Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana

Prioritas II

Membangun proses perencanaan yang terpadu mempertimbangkan Kajian Risiko Bencana, yaitu :

1. Memiliki kajian risiko bencana dan visualisasi spasial untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Memiliki Rencana Penanggulangan Bencana berbasis kajian Risiko yang diutamakan kedalam perencanaan pembangunan daerah.

Prioritas III

Mengembangkan system informasi yang terintegrasi dan efektif, yaitu :

1. Memiliki sistem informasi yang menjangkau langsung masyarakat.
2. Memiliki sistem informasi yang terintegrasi antar tingkat pemerintah dari nasional sampai lokal.

Prioritas IV

Mencukupi kualitas dan kualitas logistik daerah dalam mengantisipasi bencana, yaitu :

1. Memiliki pemahaman kebutuhan logistik daerah untuk setiap ancaman bencana.
2. Pengelolaan logistik dengan melaksanakan efektif dan efisien.
3. Tersedianya pemenuhan kebutuhan hidup di masa darurat.

Prioritas V

Meningkatkan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana yaitu :

1. Kemampuan memberdayakan masyarakat dalam membangun ketangguhan desa terhadap bencana.
2. Memperkuat penegakan hukum dan optimalisasi kebijakan.
3. Melakukan restorasi dan konservasi sumber daya alam.

Prioritas VI

Memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yaitu :

1. Menyiapkan rencana cadangan setiap ancaman bencana.
2. Membangun sistem peringatan dini hulu ke hilir.

Prioritas VII

Mengembangkan sistem pemulihan bencana, yaitu :

1. Membangun infrastruktur penting
2. Membangun pemukiman/rumah penduduk
3. Membangun penghidupan masyarakat

Penjabaran dari analisis Swot

Posisi kondisi kebencanaan di Kabupaten Kampar berada pada posisi siaga, karena koordinat x terbentuk dari sector kekuatan dengan kelemahan yang bertanda positif berarti unsur kekuatan masih mendominasi. Sedangkan koordinat yang bernilai negatif diperoleh dari selisih peluang dengan ancaman. Sehingga untuk mengurangi indeks resiko bencana di Kabupaten Kampar, pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sumber daya dari dunia usaha, serta peningkatan kapasitas masyarakat tahan bencana dan pemanfaatan sumberdaya dari masyarakat.

Bentuk-bentuk penguatan yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Bupati Kampar agar mengadakan komitmen yang jelas dan tegas dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di bidang mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, bantuan logistic serta peralatan, dan alokasi dana siap pakai untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar, agar secara persuasive maupun kebijakan untuk dapat meningkatkan peran serta dunia usaha untuk memberikan dukungan logistic dan peralatan dalam program pengurangan Risiko Bencana dan Tanggap Darurat.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar perlu mengalokasikan dana guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan potensi bencana, serta memiliki kemauan untuk membangun masyarakat tangguh bencana.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapat dukungan dana untuk mengoptimalkan fungsi teknologi informatika guna membangun system kebencanaan yang terintegrasi dan efektif, menjangkau langsung ke masyarakat, mampu merespon informasi secara efektif, dan terintegrasi sejak dari pemerintah pusat, provinsi daerah dan lokal.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar mengalokasikan dana Rapat Koordinasi agar Sekretaris Daerah selaku Ex Officio BPBD Kampar dapat melaksanakan koordinasi secara intensif, terencana, dan terpadu bersama TNI, POLRI, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk menghadapi kegiatan bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara politis, Tahun 2019 merupakan masa awal jabatan Bupati Kampar dalam mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah 2017 - 2022, dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Masyarakat Kampar Yang Madani, Berakhlak dan bermoral menuju kehidupan yang sehat, sejahtera serta berdaya saing pada tahun 2022 “

Visi Kabupaten Kampar tersebut mengandung makna dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Berakhlak dan Bermoral : Mencerminkan masyarakat yang agamis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, dan menerapkannya dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat.

2. Yang Madani dapat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari tingkat keadilan dan kesetaraan perkembangan ekonomi, kemajuan dan kesejahteraan diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya.
3. Tingkat Kehidupan yang sehat dan sejahtera, juga dapat diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia. Suatu daerah dikatakan makin maju dan sejahtera apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduk. Hal ini tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan.
4. Kemajuan dan Kesejahteraan suatu daerah juga dapat diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju dan sejahtera ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju dan sejahtera ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi. Dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
5. Daerah yang berdaya saing dan sejahtera juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju dan sejahtera juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.
6. Berdaya saing (competitive) adalah salah satu ukuran kemajuan yang dicapai. Berdaya saing disini dimaksudkan bahwa Kabupaten Kampar menjadi Kabupaten yang diperhitungkan di Provinsi Riau, baik dari segi kualitas pemerintahan, tingkat

Kesejahteraan, pemerataan, pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dalam upaya pencapaian Visi adalah :

1. Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin system sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global.
2. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan SDM yang bermartabat melalui penguasaan IPTEK yang ditopang oleh sendi-sendi ilmu, iman dan peradaban, untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing global.
3. Mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh.
4. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi 5: “Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat “.

Pelaksanaan Misi 5 dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kampar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, terkait dengan paradigma penanggulangan bencana yang menekankan manajemen resiko bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Kampar seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir perlu dilakukan, melalui peningkatan penataan lingkungan dan kebersihan.

Tabel T-C.31. : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kampar

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|--------|---|-------------------|-------------------------|---|--------|---|-------------------|-------------------------|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | |
| | Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BPBD | Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPBD Kabupaten Kampar | 12 bulan | 80.000.000 | Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BPBD | Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPBD Kabupaten Kampar | 12 bulan | 80.000.000 | Dengan telah pindahnya kantor BPBD yang memiliki tiga gedung kantor yang terbagi sehingga kebutuhan listrik dan air lebih banyak dibutuhkan |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | BPBD | Jumlah jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 453.429.074 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | BPBD | Jumlah jasa kebersihan kantor | 12 bulan | 453.429.074 | BPBD memiliki tiga gedung kantor yang terbagi sehingga membutuhkan cleaning servis dan penjaga taman demi kenyamanan dan keindahan |
| | Jasa Perbaikan peralatan kerja | BPBD | Jumlah perbaikan peralatan kerja | 12 bulan | 85.000.000 | Jasa Perbaikan peralatan kerja | BPBD | Jumlah perbaikan peralatan kerja | 12 bulan | 85.000.000 | Dengan adanya Pusdalops PB sehingga menambah peralatan kerja |
| | Penyediaan alat tulis kantor | BPBD | Jumlah alat tulis kantor | 12 bulan | 47.408.722 | Penyediaan alat tulis kantor | BPBD | Jumlah alat tulis kantor | 12 bulan | 47.408.722 | Bertambahnya jumlah bangunan di BPBD |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|----------|-------------|---|------|---|-------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | Kabupaten Kampar perlu adanya |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | BPBD | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 48.844.800 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | BPBD | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 48.844.800 | Intensitas pekerjaan yang banyak diperlukan penambahan penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BPBD | Tersedianya instalasi listrik dan penerangan gedung kantor | 12 bulan | 27.940.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BPBD | Tersedianya instalasi listrik dan penerangan gedung kantor | 12 bulan | 27.940.000 | Pemeliharaan listrik diperlukan guna penerangan kantor piket TRC di Pusdalops PB |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | BPBD | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | 233.064.100 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | BPBD | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | 233.064.100 | Penyediaan peralatan masih banyak yang belum terpenuhi di BPBD Kab. Kampar |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | BPBD | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | 12 bulan | 19.784.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | BPBD | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | 12 bulan | 19.784.000 | Informasi terkini sangat membantu dalam perkembangan dunia pers dan perlu diadakan penambahan |
| | Penyediaan makanan dan minuman | BPBD | Jumlah makanan dan minuman | 12 bulan | 71.350.000 | Penyediaan makanan dan minuman | BPBD | Jumlah makanan dan minuman | 12 bulan | 71.350.000 | Untuk menambah semangat penanggulan n bencana diperlukan adanya penambahan makanan dan minuman untuk siaga selama 24 jam |
| | Rapat-rapat koordinasi dan | BPBD | Jumlah koordinasi dan | 12 bulan | 648.638.000 | Rapat-rapat koordinasi dan | BPBD | Jumlah koordinasi dan | 12 bulan | 648.638.000 | Pengurangan Risiko Bencana |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|----------|--------------|--|------|--|----------|--------------|--|
| | konsultasi ke luar daerah | | konsultasi ke luar daerah | | | konsultasi ke luar daerah | | konsultasi ke luar daerah | | | yang diadakan BNPB, Rakornis setiap tahun dan konsultasi ke Pusat dan Daerah Penanggulangan lainnya di Indonesia |
| | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | BPBD | Terlaksananya administrasi kantor | 12 bulan | 57.660.000 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | BPBD | Terlaksananya administrasi kantor | 12 bulan | 57.660.000 | - |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | BPBD | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 12 bulan | 231.200.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | BPBD | Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 12 bulan | 231.200.000 | Alokasi dana untuk turun kejadian bencana di kecamatan masih minim |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | BPBD | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 6 bulan | 30.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | BPBD | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 12 bulan | 30.000.000 | Pemeliharaan rutin gedung kantor bertambah dengan adanya 3 bangunan gedung perkantoran |
| | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional | BPBD | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 12 bulan | 213.880.000 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional | BPBD | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 12 bulan | 213.880.000 | Dengan sering turun ke lapangan untuk penanggulangan bencana diperlukan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional |
| | Paket Pengiriman Barang Hibah dari BNPB | BPBD | Jumlah terlaksananya paket pengiriman barang hibah dari BNPB | 1 Tahun | 50.000.000,- | Paket Pengiriman Barang Hibah dari BNPB | BPBD | Jumlah terlaksananya paket pengiriman barang hibah dari BNPB | 12 Bulan | 50.000.000,- | Bertambahnya barang hibah dari BNPB |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|------------|---------------|--|-------------|---|------------|---------------|---|
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | |
| | Pengadaan pakaian kerja lapangan | BPBD | Jumlah pakaian kerja lapangan | 1 Tahun | 101.280.000 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | BPBD | Jumlah pakaian kerja lapangan | 1 Tahun | 101.280.000 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | |
| | Penyusunan laporan tahunan | BPBD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | 2.730.000 | Penyusunan laporan tahunan | BPBD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | 2.730.000 | Penyusunan laporan tahunan |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkiP) dan perjanjian Kinerja (Penja) | BPBD | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkiP) dan perjanjian Kinerja (Penja) | BPBD | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penyusunan laporan kinerja |
| | Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) | BPBD | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkiP) dan perjanjian Kinerja (Penja) | BPBD | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penyusunan laporan kinerja |
| 5 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana | | | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana | | | | | |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Kab. Kampar | Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan | 1 Dokumen | 200.000.000,- | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Kab. Kampar | Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan | 1 Dokumen | 200.000.000,- | Jumlah daerah monitoring cakupan luas sehingga diperlukan anggaran untuk penambahan |
| | Forum pertemuan dalam rangka Bulan PRB | Kab. Kampar | Meningkatnya kualitas perencanaan | 1 Kegiatan | 50.000.000 | Forum pertemuan dalam rangka Bulan PRB | Kab. Kampar | Meningkatnya kualitas perencanaan | 1 Kegiatan | 50.000.000 | Terup-datanya kegiatan informasi |

| | | | dan penganggaran daerah | | | | | dan penganggaran daerah | | | kebencanaan terbaru |
|---|--|-------------|--|--------------|-------------|--|-------------|--|--------------|-------------|---|
| | Forum pertemuan dalam rangka siaga bencana kerlahut | Kab. Kampar | Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | 1 Kegiatan | 119.999.998 | Forum pertemuan dalam rangka siaga bencana kerlahut | Kab. Kampar | Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | 1 Kegiatan | 119.999.998 | Terlaksananya forum pertemuan dalam rangka penanggulangan bencana |
| | Pembuatan perda Pencegahan Dini dan penanggulangan Bencana | Kab. Kampar | Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | 1 Kegiatan | 100.000.000 | Pembuatan perda Pencegahan Dini dan penanggulangan Bencana | Kab. Kampar | Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | 1 Kegiatan | 100.000.000 | Terlaksananya Perda pencegahan dini penanggulangan bencana |
| 6 | Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | | | | | Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | | | | | |
| | Pendataan dan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana | Kab. Kampar | Jumlah pendataan dan monitoring daerah rawan bencana | 21 Kecamatan | 100.000.000 | Pendataan dan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana | Kab. Kampar | Jumlah pendataan dan monitoring daerah rawan bencana | 21 Kecamatan | 100.000.000 | Terpenuhinya pendataan pengkajian pasca bencana |
| | Rehabilitasi sarana dan prasarana Pasca bencana | Kab. Kampar | Jumlah fasilitas saranan-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | 5 Kegiatan | 200.000.000 | Rehabilitasi sarana dan prasarana Pasca bencana | Kab. Kampar | Jumlah fasilitas saranan-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | 5 Kegiatan | 200.000.000 | Terpenuhinya rehabilitasi sarana prasarana |
| | Rekonstruksi sarana dan prasarana Pasca bencana | Kab. Kampar | Jumlah fasilitas saranan-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | 5 Kegiatan | 200.000.000 | Rekonstruksi sarana dan prasarana Pasca bencana | Kab. Kampar | Jumlah fasilitas saranan-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | 5 Kegiatan | 200.000.000 | Terpenuhinya rekonstruksi sarana prasarana |
| | Program Bidang Kedaruratan dan Logistik | | | | | Program Bidang Kedaruratan dan Logistik | | | | | |
| | Peningkatan kapasitas tanggap darurat | Kab. Kampar | Jumlah kapasitas tanggap darurat | 7 Kegiatan | 200.000.000 | Peningkatan kapasitas tanggap darurat | Kab. Kampar | Jumlah kapasitas tanggap darurat | 7 Kegiatan | 200.000.000 | Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana masih minim |

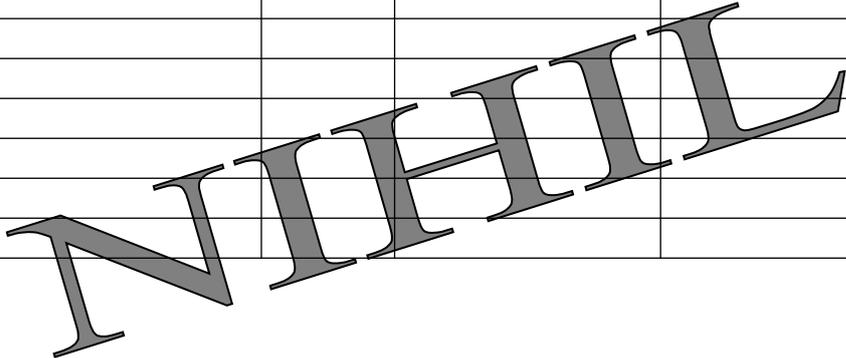
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|------------|------------------------|--|-------------|--|------------|------------------------|--|
| | Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) | BPBD | Terselenggaranya TRC, fasilitas penyelamatan dan evakuasi | 1 Tahun | 350.000.000 | Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) | BPBD | Terselenggaranya TRC, fasilitas penyelamatan dan evakuasi | 1 Tahun | 350.000.000 | Terselenggaranya TRC, fasilitas penyelamatan dan evakuasi |
| | Pengembangan Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR | BPBD | Terpenuhinya Pengembangan Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR | 1 Tahun | 150.602.428 | Pengembangan Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR | BPBD | Terpenuhinya Pengembangan Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR | 1 Tahun | 150.602.428 | Terpenuhinya Pengembangan Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR |
| | Pengadaan peralatan Bencana | BPBD | Tersedianya stok logistik dan peralatan penunjang tanggap darurat | 1 kegiatan | 250.000.000 | Pengadaan peralatan Bencana | BPBD | Tersedianya stok logistik dan peralatan penunjang tanggap darurat | 1 kegiatan | 250.000.000 | Terpenuhinya pengadaan peralatan bencana |
| | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan | | | | | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan | | | | | |
| | Penyuluhan Budaya sadar bencana pada Kecamatan Rawan Bencana | Kab. Kampar | Meningkatnya pelopor kesadaran bencana | 50 relawan | 150.000.000 | Penyuluhan Budaya sadar bencana pada Kecamatan Rawan Bencana | Kab. Kampar | Meningkatnya pelopor kesadaran bencana | 50 relawan | 150.000.000 | Terpenuhinya penyuluhan budaya sadar bencana |
| | Upaya peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional | Kab. Kampar | Jumlah kelompok masyarakat sadar bencana | 1 kali | 50.000.000 | Upaya peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional | Kab. Kampar | Jumlah kelompok masyarakat sadar bencana | 1 kali | 50.000.000 | Terpenuhinya upacara peringatan hari kesiapsiagaan |
| | JUMLAH | | | | 4.542.811.122,- | | | | | 4.542.811.122,- | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021, merupakan masukan dari internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, disamping merupakan masukan dari instansi terkait, tokoh masyarakat, Ormas/LSM, Musrenbang serta dari pokok pikiran anggota legislatif. Dunia usaha, yang langsung ditujukan kepada kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan hasil pengumpulan informasi, proposal, pendataan dan penelitian lapangan tidak adanya usulan yang diberikan.

Tabel T.C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|-------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke berupa pengurangan risiko bencana yang terkandung dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah masih menghadapi tantangan. Untuk itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga yang diamanatkans Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan Fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi harus bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Disadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas, sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Terbentuknya Kelembagaan Penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di daerah merupakan wujud fungsi protektif pemerintah dalam menangkap berbagai permasalahan yang timbul terkait bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomr 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Ruang lingkup penanggulangan bencana tidak saja pada

saat terjadi bencana, namun mulai dari proses deteksi, pencegahan dini hingga pasca bencana.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa potensi bencana terbesar yang terjadi di Indonesia adalah bencana banjir sebesar 45%, selanjutnya angin puting, selanjutnya angin puting beliung sebesar 36 %, dan disusul longsor dengan persentase sebesar 19, Provinsi Riau termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi bencana terbesar terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan bencana longsor.

Memperhatikan pola hujan di Indonesia ada tiga tipe yakni Ekuatorial, Monsunal, dan Lokal. Wilayah yang tipe hujan Monsunal yaitu sebagaimana wilayah Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalsel dan Kalteng. Puncak Hujan akan terjadi pada Januari.

Bencana banjir dan longsor merupakan tipe bencana yang slow on set, artinya terjadi secara perlahan namun dapat dideteksi keberadaannya, sehingga kesiapsiagaan bisa dilakukan oleh semua pihak. Dalam menangani bencana banjir dan longsor, BNPB melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga. Diantaranya, Kementerian Kesehatan, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Lpan dan Basarnas.

Secara garis besar, peran dan fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintah di tingkat pusat adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana lintas kementerian dan Lembaga.
2. Kementerian Dalam Negeri mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
3. Kementerian Luar Negeri mendukung program-program dan kegiatan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan mitra Internasional.

4. Kementerian Pertahanan mendukung pengamanan daerah-daerah yang terkena bencana, baik pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana.
5. Kementerian Hukum dan HAM mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat-perangkat hukum terkait kebencanaan.
6. Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra, saat dan pasca bencana.
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi.
8. Kementerian pertanian merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait bidang pertanian.
9. Kementerian kehutanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi khususnya kebakaran hutan/lahan.
10. Kementerian Perhubungan merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi.
11. Bencana Kementerian Kelautan dan perikanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai.
12. Kementerian Pekerjaan Umum merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana publik
13. Kementerian Kesehatan merencanakan pelayanan kesehatan dan medic termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedic
14. Kementerian Pendidikan Nasional merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana.

15. Kementerian Sosial merencanakan kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi.
16. Kementerian Komunikasi dan Informatika merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana.
17. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merencanakan pengarah dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana.
18. Kementerian Riset dan Teknologi melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
19. Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan.
20. Kementerian lingkungan hidup merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup.
21. Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal merencanakan dan mengendalikan program-program pembangunan di daerah tertinggal yang berdasarkan kajian risiko bencana.
22. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mendukung perencanaan program-program pembangunan yang peka risiko bencana.
23. Kementerian Perumahan Rakyat mengkoordinasikan pengadaan perumahan untuk warga-warga yang menjadi korban bencana.
24. Tentara Nasional Indonesia membantu dalam kegiatan pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian dan menyelenggarakan kegiatan penyarian dan penyelematan (SAR).

25. Kepolisian Republik Indonesia membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi.
26. Basarnas mendukung BNPB dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR).
27. Bakosurtanal merencanakan dan mengendalikan pemetaan risiko bencana bekerjasama dengan kementerian/lembaga teknis.
28. BMKG membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan dengan meteorology, klimatologi dan geofisika.
29. BPPT membantu dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi khususnya teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
30. BPS membantu dalam bidang penyediaan data-data statistik
31. BPN membantu dalam bidang penyediaan data-data pertanahan.
32. LIPI membantu dalam bidang pengkajian ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
33. LAPAN membantu dalam bidang penyediaan informasi dan data spasial khususnya dari satelit.
34. BSN membantu dalam bidang standarisasi pedoman-pedoman maupun panduan penanggulangan bencana.
35. Bapeten membantu dalam bidang pemantauan, pemanfaatan dan pengendalian bahaya nuklir.
36. BATAN membantu dalam bidang pemantauan, pemanfaatan dan pengendalian bahaya akibat tenaga atom.

Dalam situasi normal atau dalam situasi tidak terdapat bencana, program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Kegiatan mitigasi structural seperti membangun tanggul penahan banjir dan jalur-jalur Evakuasi misalnya saja, menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Persiapan logistik untuk mencukupi

kebutuhan penduduk yang mengungsi dalam situasi darurat menjadi tugas dan tanggung jawab kementerian social.

Dalam situasi normal, BNPB dan BPBD di tingkat daerah lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Beberapa kegiatan pengurangan risiko bencana tertentu akan memerlukan kerjasama antara berbagai instansi seperti sosialisasi system peringatan dini dan pelatihan penggunaannya akan melibatkan dinas pendidikan, perguruan tinggi dan LSM, dengan BNPB/BPBD sebagai coordinator pelaksanaannya.

Dalam situasi darurat BNPB dan BPBD menjalankan fungsi Komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BNPB BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat. Dalam situasi pasca bencana BNPB dan BPBD kembali menjalankan fungsinya dalam hal Koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sector masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan bencana di pusat maupun daerah akan memerlukan koordinasi dengan semua sektor dan unsure masyarakat. Pembagian peran diantara para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana juga akan menjadi hal yang diatur melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana ini.

BNPB memiliki Rencana Kontinjensi Nasional menghadapi Bencana Banjir dan Longsor Tahun 2014/2015. Isinya tentang kebijakan, Strategi, Koordinasi, komando, upaya yang dilakukan, pengarahan, pengarahan sumber daya. Bencana-bencana tersebut juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau, dan bahkan ada yang sudah merupakan bencana rutin pada setiap tahun, seperti bencana banjir dan angin puting beliung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana, upaya

penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan pada aspek-aspek yang meliputi ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkungan luas daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan sasaran Renja OPD BPBD Kabupaten Kampar merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Dalam hal ini, perumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sebagai perangkat daerah Kabupaten Kampar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dituntut untuk melaksanakan program/kegiatan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana, dalam kondisi terjadi bencana, maupun pasca terjadinya bencana. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai BPBD Kabupaten Kampar Tahun 2021 :

- Tujuan

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana.
2. Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana.
3. Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur publik pasca bencana.
4. Meningkatkan Peran dan Fungsi Kelembagaan dalam rangka Efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan bencana.

- Sasaran

1. Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Kemampuan Pemerintah dalam upaya pengurangan Resiko Bencana.
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya fasilitasi dan Koordinasi dalam upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana.
4. Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan Kelembagaan Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Terwujudnya Masyarakat dan Dunia Usaha Peduli Bencana.

| NO | TUJUAN | SASARAN |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | Optimalisasi Penanggulangan bencana | 1. Terkoordinasinya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah regulasi yang disusun b. Jenis data yang dimiliki c. Jumlah masyarakat yang sudah menerima sosialisasi d. Jumlah peralatan yang dimiliki untuk penanggulangan bencana 2. Terlaksana dan terintegrasinya penanganan tanggap darurat bencana |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase petugas penanggulangan bencana yang mempunyai skill b. Prosentase masyarakat yang menerima logistik bencana <p>3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase infrastruktur/fasilitas umum b. Jumlah kasus trauma heling c. Panjang jalan yang direhabilitasi dan di rekonstruksi d. Jumlah das yang rawan bencana |
|--|--|--|

BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar. Untuk itu, disusun visi dan Misi BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2017-2022. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2017 -2022 yaitu sebagai berikut : “Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas Dalam Menanggulangi Bencana”

Tanggap adalah memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan bencana.

Tangguh adalah memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam menghadapi bencana serta memiliki kemampuan dan kepekaan didalam pengendalian bencana

Terampil adalah memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang dimiliki dalam penanggulangan bencana.

Tuntas adalah melaksanakan upaya-upaya pemulihan dengan baik, terencana, terkoordinasi, menyeluruh terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana
2. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis (Renstra) OPD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 yang telah disusun. Didalam proses Rencana Kerja, Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan di Implementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja, Pada dokumen Rencana Kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2021 pada OPD BPBD Kabupaten Kampar berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam renstra BPBD Kabupaten Kampar 2017-2022, yang terdiri dari :

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kampar, Pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Kampar adalah

sebagai OPD pendukung dalam Pembangunan Kabupaten Kampar 2017-2022.

Program BPBD Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan perencanaan pembangunan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas yang merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dan lintas OPD. Oleh karena itu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis ini hanya mencakup program dan kegiatan yang pendanaannya dari APBD Kabupaten Kampar.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2021 pada OPD BPBD Kabupaten Kampar berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra BPBD Kabupaten Kampar 2017-2022 yang terdiri dari :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta data dan informasi tentang penanggulangan bencana.
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan OPD
3. Terlaksananya penyusunan perencanaan umum penanggulangan bencana.
4. Terlaksananya pengurangan resiko bencana.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

6. Meningkatkan kemampuan aparaturnya, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Program-program yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis terdiri dari 9 Program, yakni :

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana
3. Program peningkatan disiplin aparaturnya
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya
5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program peningkatan kesiagaan dan bahaya kebakaran
7. Program Perencanaan Pembangunan daerah rawan
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
9. Program Pencegahan / Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar selama 2 tahun terakhir mengalami pengurangan anggaran. Untuk kelancaran penanggulangan bencana perlu adanya support dan dukungan dana dari pemerintah dan legislatif. Banyak dari program dan kegiatan-kegiatan dalam rencana kerja yang diusulkan tidak memadai yang diharapkan, sehingga banyak dari program dalam kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan/kosong.

Dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sangat mengharapkan penambahan anggaran dari alokasi yang dianggarkan semula tidak memadai untuk pelaksanaan penanggulangan bencana. Bahkan menurut peraturan yang berlaku untuk penganggaran di BPBD dianggarkan minimal 1% dari dana APBD daerah yang bersangkutan.

Berikut ini rincian kegiatan per program pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 seperti terlihat pada Tabel 3.1

TABEL T-C.33. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAPORAN HASIL RANCANGAN RKPD/ PRA MUSRENBANG 2021 PER SUMBER DANA SEMUA SUMBER DANA

KABUPATEN KAMPAR

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Sub Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Keg | OPD Penanggung jawab | Pengusul | Sumber Dana | | | | |
|------|---|--------------|------------------|----------------|--------|-------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|---------------|--|----------------|---|----------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 05 | 01. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 05 | 03 | 01 | 02 | 0 | 1. | MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12,00 Bulan | Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12,00 Bulan | 61,200,000 | 61,200,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 01 | 08 | 0 | 1. | MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 12,00 Bulan | Terpenuhinya jasa kebersihan kantor | 12,00 Bulan | 288,849,074 | 288,849,074 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|---|----------------------------------|---|-----------------------|---|---------------|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 2 | 05 | 03 | 019 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 12,00 Bulan | Terpenuhinya realisasi pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 12,00 Bulan | 73,000,000 | 73,000,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 010 | Penyediaan alat tulis kantor | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor | 12,00 Bulan | Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor | 12,00 Bulan | 47,244,960 | 47,244,960 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12,00 Bulan | Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12,00 Bulan | 19,266,150 | 19,266,150 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Tersedianya penerangan gedung kantor dan gudang | 12,00 Bulan | Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12,00 Bulan | 27,980,000 | 27,980,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 013 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 12,00 Bulan | Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor | 12,00 Bulan | 57,720,000 | 57,720,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12,00 Bulan | Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12,00 Bulan | 19,784,000 | 19,784,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 017 | Penyediaan makanan dan minuman | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Tersedianya makanan dan minuman | 12,00 Bulan | Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman | 12,00 Bulan | 83,825,000 | 83,825,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 018 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12,00 Bulan | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12,00 Bulan | 631,722,000 | 631,722,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|--|---|----------------------------------|---|----------------------------|--|---------------|--|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 2 | 05 | 03 | 01 | 19 | Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Tersedianya jasa tenaga harian lepas | 12,00 Bulan | Terpenuhinya jasa tenaga harian lepas | 12,00 Bulan | 263,910,000 | 263,910,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 02 | 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 Persen | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 12,00 Bulan | Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 12,00 Bulan | 231,122,000 | 231,122,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 02 | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 05 | 03 | 02 | 05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100,00 Persen | Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional | 1,00 Unit | Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional | 2,00 Unit | 540,000,000 | 540,000,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PAD |
| 2 | 05 | 03 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | Kabupaten Kampar | Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur | 100,00 Persen | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1,00 Tahun | Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1,00 Tahun | 15,000,000 | 15,000,000 | Alternatif | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Tercapainya pemeliharaan dan operasional kendaraan mobil dinas Camat dan Mobil Operasional | 1,00 Tahun | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 100,00 Persen | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1,00 Tahun | 516,626,000 | 516,626,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 02 | 05 | Paket Pengiriman Barang Hibah dari BNPB | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD Kabupaten Kampar | Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,00 Tahun | Terlaksananya paket pengiriman Barang Hibah dari BNPB | 1,00 Tahun | Terpenuhinya Paket Pengiriman Barang Hibah dari BNPB | 1,00 Tahun | 0 | 0 | Alternatif | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 05 | 03 | 03 | 03 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.2. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur | BPBD KABUPATEN ATEN KAMPAR | Tingkat Kehadiran Aparatur | 1,00 Tahun | Tersedianya pakaian kerja lapangan | 70,00 Orang | Terpenuhinya pakaian kerja lapangan | 70,00 orang | 105,540,000 | 105,540,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----|----|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 2 | 05 | 06. | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 05 | 03 | 06 | 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPBD KABUPATEN KAMPAR | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100,00 Persen | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1,00 Dokumen | Terpenuhinya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1,00 Dokumen | 2,730,000 | 2,730,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 06 | 09 | Penyusunan laporan tahunan | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPBD KABUPATEN ATEN KAMPAR | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100,00 Persen | Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1,00 Dokumen | Terpenuhinya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 1,00 Dokumen | 0 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 06 | 18 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja (Penja) | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPBD KABUPATEN ATEN KAMPAR | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100,00 Persen | Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja (Penja) | 2,00 Dokumen | Terpenuhinya penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penja | 2,00 Dokumen | 0 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 2 | 05 | 03 | 06 | 20 | Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah | BPBD KABUPATEN ATEN KAMPAR | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100,00 Persen | Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) | 1,00 Dokumen | Terpenuhinya penyusunan rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) | 1,00 Dokumen | 0 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 4 | | | | | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | | | | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 25. | | | Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 03 | 25 | 30 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kabupaten Kampar | Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana | 100,00 persen | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah rawan bencana Kabupaten Kampar | 8,00 Dokumen | Terpenuhinya Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 8,00 Dokumen | 129,287,116 | 129,287,116 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 4 | 02 | 03 | 25 | 10 | Forum Pertemuan Dalam Rangka Bulan PRB | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran | Kabupaten Kampar | Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggulangan | 100,00 persen | Ter-up datenya 10 Kegiatan Informasi Kebencanaan | 1,00 Kegiatan | Terpenuhinya Forum Pertemuan dalam | 1,00 Kegiatan | 0 | 0 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | DAU |

| | | | | | | | daerah | | an Bencana | | | Rangka Bulan PRB | | | | | DAERAH | DAERAH | | | |
|---|----|----|-----|---|--|---|----------------------------------|--|------------------|---|---------------|--|---------------|--|----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 4 | 02 | 03 | 258 | 1 | Forum Pertemuan dalam Rangka Siaga Bencana Karlahut | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kabupaten Kampar | Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana | 100,00 persen | Terlaksananya forum pertemuan dalam rangka siaga bencana Karlahut | 1,00 Kegiatan | Terperuhnya Forum Pertemuan dalam Rangka Siaga Bencana Karlahut | 1,00 Kegiatan | 57,864,050 | 57,864,050 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 4 | 02 | 03 | 250 | 2 | Pembuatan Perda Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 1.5.7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah | Kabupaten Kampar | Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana | 100,00 persen | Terlaksananya perda pencegahan dini dan penanggulangan bencana | 1,00 Dokumen | Terperuhnya Pembuatan Perda Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana | 1,00 Dokumen | 0 | 0 | Alternatif | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 6 | | | | | URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 25 | | | Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 03 | 251 | 0 | Pendataan, Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 2.6.2. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | Kabupaten Kampar | Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana | 100,00 persen | Tersedia 8 (Delapan) Dokumen Kerusakan Pasca Bencana | 1,00 Kegiatan | Terperuhnya Ppendataan, Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana | 1,00 Kegiatan | 76,825,000 | 76,825,000 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |
| 6 | 01 | 03 | 254 | 0 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 2.6.2. Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana | Kabupaten Kampar | Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana | 100,00 persen | Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana | 5,00 Kegiatan | Terperuhnya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana | 1,00 Kegiatan | 131,904,700 | 131,904,700 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PAD |
| 6 | 01 | 26 | | | Program Bidang Kedaruratan dan Logistik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 03 | 261 | 0 | Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat. | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 2.6.3. Tersedianya Stok Logistik dan Peralatan Penunjang Tanggap Darurat | Kabupaten Kampar | Persentase ketersediaan stok logistik dan peralatan penunjang tanggap darurat | 100,00 persen | Terlaksananya kegiatan tanggap darurat (penyediaan bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, TRK, Uang Lelah saat kejadian, penyiapan shelter, | 7,00 Kegiatan | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat | 10,00 Kegiatan | 166,731,500 | 166,731,500 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|--|---|----------------------------------|---|------------------|---|--------------------------------|--|--------------|---|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | | evakuasi, mobil dapur lapangan | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 03 | 26 | 02 | Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 2.6.3. Tersedianya Stok Logistik dan Peralatan Penunjang Tanggap Darurat | Kabupaten Kampar | Persentase ketersediaan stok logistik dan peralatan penunjang tanggap darurat | 100,00 persen | Terselenggaranya TRC, fasilitas penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi | 1,00 Tahun | Terpenuhinya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana | 1,00 Tahun | 519,165,950 | 519,165,950 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU | | |
| 6 | 01 | | 27 | | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 03 | 27 | 04 | Penyuluhan Budaya Sadar Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana | 0 | 1. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN | 2.6.1. Terdiseminasiannya informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses | Kabupaten Kampar | Jumlah kelompok masyarakat sadar bencana | 100,00 kelompok | Meningkatnya 5000 orang pelopor kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana di Kabupaten Kampar | 650,00 Orang | Terpenuhinya Penyuluhan Budaya Sadar Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana | 650,00 Orang | 82,889,050 | 82,889,050 | Sedang Berjalan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | DAU | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | 4,150,186,550 | 4,542,811,123 | | | | | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis (Renstra) OPD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 yang telah disusun. Didalam proses Rencana Kerja, Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan di Implementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja, Pada dokumen Rencana Kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2021 pada OPD BPBD Kabupaten Kampar berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam renstra BPBD Kabupaten Kampar 2017-2022, yang terdiri dari :

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kampar, Pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Kampar adalah sebagai OPD pendukung dalam Pembangunan Kabupaten Kampar 2017-2022.

Program BPBD Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan perencanaan pembangunan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas yang merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dan lintas OPD. Oleh karena itu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis ini hanya mencakup program dan kegiatan yang pendanaannya dari APBD Kabupaten Kampar.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2021 pada OPD BPBD Kabupaten Kampar berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra BPBD Kabupaten Kampar 2017-2022 yang terdiri dari :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta data dan informasi tentang penanggulangan bencana.
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan OPD
3. Terlaksananya penyusunan perencanaan umum penanggulangan bencana.
4. Terlaksananya pengurangan resiko bencana.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
6. Meningkatkan kemampuan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Program-program yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis terdiri dari 9 Program, yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Program Perencanaan Pembangunan daerah rawan
6. Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7. Program Bidang Kedaruratan dan Logistik

8. Program Pencegahan Dinidan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar selama 2 tahun terakhir mengalami pengurangan anggaran. Untuk kelancaran penanggulangan bencana perlu adanya support dan dukungan dana dari pemerintah dan legislatif. Banyak dari program dan kegiatan-kegiatan dalam rencana kerja yang diusulkan tidak memadai yang diharapkan, sehingga banyak dari program dalam kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan/kosong.

Dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sangat mengharapkan penambahan anggaran dari alokasi yang dianggarkan semula tidak memadai untuk pelaksanaan penanggulangan bencana. Bahkan menurut peraturan yang berlaku untuk penganggaran di BPBD dianggarkan minimal 1% dari dana APBD daerah yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah berbagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholder) dalam menciptakan Pemerintahan yang bagus sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kampar adalah Program Tahunan BPBD Kabupaten Kampar yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program BPBD Kabupaten Kampar. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kampar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Kampar. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kampar. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BPBD Kabupaten Kampar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat BPBD Kabupaten Kampar selama kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek kabupaten Kampar

juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2021. Adapun fungsi dari Renja tahun 2021 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2021 bagi BPBD, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) BPBD kami susun secara obyektif dengan mengacu kepada Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Bangkinang, Desember 2020
Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN KAMPAR

AFRUDIN AMGA, ST.,MT
NIP. 19760422 200605 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja OPD Tahun 2021 merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, dan diserasikan dengan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap perubahan, dengan jenjang perencanaan, yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek.

Ucapan terimakasih Kami sampaikan kepada semua pihak dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang telah menyumbangkan pikiran, hingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan Pemerintah an dan Kesejahteraan sosial.

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN KAMPAR

AFRUDIN AMGA, ST.,MT
NIP. 19760422 200605 1 001

DAFTAR ISI

i

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 1.4. Sistimatika Penulisan..... | 7 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu..... | 10 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 29 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 43 |
| 2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 49 |
| 2.5 Penelahaan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 58 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional..... | 59 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 64 |
| 3.3 Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai... | 67 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 79 |
| BAB V PENUTUP..... | 82 |

DAFTAR ISI TABEL

| | | |
|--------------|--|----|
| Tabel T-C.29 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d tahun berjalan..... | 24 |
| Tabel T-C.30 | Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD..... | 41 |
| Tabel T-C.31 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 52 |
| Tabel T-C.32 | Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021..... | 58 |
| Tabel T-C.33 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD dan Prakiraan Maju..... | 72 |

